



Implementasi E-Government Melalui Klampis New Generation (KNG) Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Pindah Keluar Antar Kota/Kabupaten Atau Provinsi Di Kelurahan Bulak Banteng

Kinanti Idang Afrita¹, Lukman Arif²

^{1,2}, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstrak

Received: 19 Agustus 2023

Revised : 30 Agustus 2023

Accepted: 01 September 2023

Pelayanan publik merupakan sebuah bentuk kewajiban pemerintah untuk mengabdikan kepada masyarakat dan sebagai bentuk realisasi pembangunan bangsa. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam aspek kependudukan. Tanggungjawab pelayanan kependudukan ini dipegang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu bentuk inovasi terhadap peningkatan kualitas layanan kependudukan Kota Surabaya adalah dengan diterbitkannya sebuah sistem bernama Klampid New Generation (KNG). Implementasi Klampid New Generation (KNG) disambut antusias oleh warga masyarakat Kelurahan Bulak Banteng, dan memberikan implikasi yang positif terhadap aktualisasi pemerintahan yang baik

Keywords: *Pelayanan administrasi kependudukan, e-government, Klampid New Generation*

(*) Corresponding Author: kinantiafrita@gmail.com

How to Cite: Afrita K I, & Arif L. (2023). Implementasi E-Government Melalui Klampis New Generation (KNG) Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Pindah Keluar Antar Kota/Kabupaten Atau Provinsi Di Kelurahan Bulak Banteng. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8314198>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang signifikan meresap di setiap bidang kehidupan, salah satunya pada bidang pemerintahan. Perkembangan teknologi dalam lingkup pemerintahan dikenal dengan nama e-government. E-government adalah sebuah sistem yang menggunakan implementasi teknologi untuk mempermudah pelaksanaan birokrasi pemerintahan (Lestari dkk., 2021). Pada faktanya, e-government mencakup pelayanan publik. Eksistensi pelayanan publik menjadi penting untuk menunjang pelaksanaan reformasi. Selain itu, pemerintah selaku pihak yang menjalankan administrasi negara memiliki tanggungjawab penuh terhadap terpenuhinya pelayanan terhadap masyarakat (Riani, 2021).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah badan yang dibentuk oleh negara, yang mana badan tersebut bertanggungjawab secara penuh untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap administrasi kependudukan bangsa Indonesia. Secara spesifik, layanan dari Dinas Kependudukan Sipil diantaranya berkaitan dengan pembuatan akta kelahiran dan akta kematian. Tak hanya itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menangani pembuatan Kartu Keluarga baru, perubahan Kartu Keluarga, pembuatan dan perubahan pada Kartu Tanda Penduduk, pengurusan pindah keluar atau pindah datang antar kota/kabupaten, ijin tinggal terbatas dan ijin tinggal tetap oleh warga negara asing.

Tiap-tiap daerah di Indonesia, terdapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil-nya masing-masing, termasuk di Surabaya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan

administratif terkait pencatatan sipil dan kependudukan pada wilayah administrasi Surabaya dan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, pemberian pelayanan yang baik dan tepat sasaran akan memberikan implikasi pada kepuasan pemohon terhadap layanan yang diberikan. Untuk mengetahui kualitas dari pemberian pelayanan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya harus dilakukan evaluasi mengenai bagaimana pelaksanaan tanggungjawabnya selama ini.

Supaya pemenuhan hak-hak masyarakat dapat berjalan dengan baik, kualitas dan efektivitas dari pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kantor Kelurahan Bulak Banteng merupakan salah satu unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya milik pemerintah yang sifatnya dinamis dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai tempat pelayanan publik di wilayahnya. Salah satu bagian yang ada di kelurahan Bulak Banteng adalah Pelayanan dan Pemerintahan yang melayani administrasi kependudukan.

Salah satu implementasi teknologi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Surabaya adalah dengan adanya Klampid New Generation atau lebih dikenal dengan nama KNG. Klampid New generation (KNG) merupakan sebuah sistem yang dikemas dalam bentuk aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan kepengurusan administrasi kependudukan secara daring (online), meliputi kepengurusan KTP, kematian, kelahiran, pindah, atau datang. Klampid New generation (KNG) merupakan bentuk terbaru dari aplikasi kependudukan sebelumnya, yang bernama Klampid (Putri dkk., 2022).

Klampid New generation (KNG) dinilai lebih efisien dibandingkan Klampid, Klampid New generation (KNG) dibuat lebih fleksibel dan minim error, tampilan aplikasi juga dibuat lebih sederhana untuk mempermudah pemohon dalam mengakses layanan publik yang diinginkan. Melalui Klampid New generation (KNG), pemohon dapat mengakses layanan melalui online (Rochimin, 2023). Namun, jumlah wilayah yang luas, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya pembaharuan dokumen kependudukan membuat terkendalanya pelayanan di lingkungan Kelurahan Bulak Banteng.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat topik mengenai bagaimana implementasi e-government berbasis Klampid New generation (KNG) dalam pelayanan publik, khususnya pada pelayanan pindah keluar antar kota/kabupaten atau provinsi di Kelurahan Bulak Banteng, Surabaya. Dalam hal ini berkaitan tentang prosedur pemohon atau warga dalam mengajukan dokumen pindah alamat (keluar dari wilayah administrasi terkait)

METODE

Metode penelitian kualitatif deskriptif menjadi metode yang dipilih dalam penelitian ini. Data diperoleh dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung, yang di dalamnya meliputi observasi, partisipasi aktif, dan dokumentasi kegiatan yang dilakukan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles dkk., 2014). Berdasarkan penelitian dari Wahyono (2019), definisi dari metode deskriptif adalah metode penelitian yang penyampaian datanya dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yakni penjelasan mengenai topik atau permasalahan yang diambil. Dengan demikian, metode

penelitian kualitatif deskriptif ini berupaya memvisualisasikan fakta dan data yang terdapat di lapangan dalam kata penjelas yang dapat dipahami oleh pembaca.

Adapun lokasi dari penelitian ini bertempat di Kantor Kelurahan Bulak Banteng, Jalan Bulak BANTENG Lor 1/27, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Subjek penelitian ini berfokus pada pegawai di kantor Kelurahan Bulak Banteng dan juga para pemohon, yakni masyarakat yang menggunakan layanan administrasi kependudukan di kantor Kelurahan Bulak Banteng, khususnya yang menggunakan Klampid New generation (KNG). Hasil yang ingin dicapai dari aktualisasi penelitian ini adalah bagaimana penerapan dari KNG terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Bulak Banteng, Surabaya. Dalam penelitian ini, terdapat tiga macam teknik pengumpulan data, yakni :

1. Teknik Observasi

Teknik observasi yang dipakai yaitu teknik observasi kualitatif, yang mana teknik observasi kualitatif tidak memiliki batasan-batasan terkait pengukuran dan konversi numerik. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dari hasil pengamatan secara langsung terhadap subjek yang dituju. Dengan demikian, teknik observasi bisa dikatakan sebagai teknik pengumpulan data secara visual (Hasanah, 2016).

2. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif berarti peneliti turut berpartisipasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Bulak Banteng. Pada partisipasi aktif, peneliti berupaya untuk menganalisa, mengkaji, dan mengambil data dari seputar pelaksanaan kegiatan yang diikuti oleh peneliti (Kurnianingtyas dan Nugroho, 2012).

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan mengambil atau menyimpan data yang didapatkan dalam bentuk fisik, baik tertulis, maupun berbentuk foto atau video. Di dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah gambar tampilan aplikasi Klampid New Generation (KNG), Surat Keterangan Pindah, dan laporan data pindah keluar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Bulak Banteng (Kurnianingtyas dan Nugroho, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Bulak Banteng merupakan wilayah administrasi yang berada di bawah naungan kecamatan. Lurah dipilih serta diangkat secara langsung oleh camat untuk kemudian diberi tanggungjawab dalam memimpin suatu kelurahan. Kelurahan merupakan unit pemerintahan setara dengan desa, sehingga kelurahan tergolong ke dalam unit pemerintahan terkecil. Namun, kelurahan dinilai memiliki sistem pemerintahan yang dianggap lebih maju, dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang ada di desa. Oleh karena kelurahan merupakan unit pemerintahan yang paling terkecil, maka pelayanan administrasi publiknya memiliki jangkauan yang lebih dekat. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwasanya dalam implementasinya untuk melakukan pelayanan terhadap publik, Kelurahan Bulak Banteng menerapkan sistem Klampid New Generation (KNG) berbasis online untuk mempermudah pelayanan dari pemohon yang bersangkutan.

Cakupan pelayanan dari Klampid New Generation (KNG) cukup luas, diantaranya adalah pelayanan batal pindah antar kota/kabupaten/provinsi,

pelayanan batal pindah dalam kota, pelayanan cetak ulang kartu keluarga, pelayanan dispensasi pindah keluar, pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), pelayanan dispensasi surat pindah dari daerah asal, pelayanan perubahan alamat tempat tinggal, pelayanan perubahan biodata diri, pelayanan pindah dalam kota, pelayanan pindah datang, pelayanan pindah keluar dan pelayanan cetak ulang SKPWNI, serta pelayanan pindah keluar OA/ Exit Permit Only (EPO) (Hidayati dan Hariyoko 2023). Dari beberapa pelayanan yang termuat di dalam Klampid New Generation (KNG), jenis pelayanan yang paling sering diajukan oleh masyarakat Bulek Banteng adalah permohonan pindah keluar. Permohonan pindah keluar bertujuan untuk memindahkan tempat tinggal dari masyarakat Bulek Banteng ke dalam wilayah administrasi yang bukan cakupan dari Kelurahan Bulek Banteng tersebut.

PINDAH KELUAR	
BULAN	JUMLAH
Februari	2
Maret	5
April	6
Mei	23
Juni	15
Jumlah	51

Tabel 1. Data permohonan pindah keluar pada bulan Februari sampai Juni 2023

Pada implementasinya, keberhasilan penggunaan Klampid New Generation (KNG) berhubungan dengan beberapa faktor berikut, diantaranya adalah faktor *branding*, faktor sumber daya, konsistensi, dan struktur birokrasi dari kelurahan itu sendiri (Putri dkk., 2022). Faktor *branding* menempati urutan pertama sebagai faktor yang paling berkontribusi terhadap efektifnya implementasi Klampid New Generation (KNG) di Kelurahan Bulak Banteng. Kelurahan Bulak Banteng pada hakikatnya harus mampu melakukan *branding* terhadap eksistensi Klampid New Generation (KNG). Informasi mengenai Klampid New Generation (KNG) harus disampaikan secara detail dan spesifik terhadap seluruh komponen masyarakat Kelurahan Bulak Banteng tanpa terkecuali. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat sadar terhadap perubahan data kependudukan dan pencatatan sipil. Selama ini, masyarakat hanya tau mengenai proses perubahan data kependudukan dan pencatatan sipil yang cukup kompleks, berbelit-belit dan memakan banyak waktu. Sehingga, kesadaran mereka terhadap perubahan data kependudukan dan pencatatan sipil menjadi turun. Namun, dengan adanya *branding* Klampid New Generation (KNG) ini, diharapkan antusias masyarakat dalam melakukan perubahan data kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya data pindah keluar menjadi meningkat.

Faktor penentu efektifitas implementasi Klampid New Generation (KNG) yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya yang terlibat di dalam bahasan ini adalah sumber daya manusia, sumber daya operasional, dan sumber daya waktu. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi etika moral maupun pada kemampuan mengoperasikan Klampid New Generation (KNG) itu sendiri, sehingga apabila terjadi galat atau error pada aplikasi, pegawai tidak perlu bingung karena sudah

menguasai aplikasi Klampid New Generation (KNG) tersebut. Sumber daya finansial perlu digunakan sebaik mungkin untuk peningkatan penggunaan Klampid New Generation (KNG), misalnya untuk perbaikan versi, perbaikan algoritma, dan lain sebagainya. Sumber daya waktu yang digunakan dalam memproses layanan melalui Klampid New Generation (KNG) perlu diperhatikan lebih lanjut, karena pada umumnya masyarakat cenderung menyukai pelayanan yang tepat sasaran dalam waktu yang relatif singkat.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap keberhasilan Klampid New Generation adalah konsistensi. Konsistensi yang dimaksud berhubungan secara signifikan terhadap kualitas layanan yang ditawarkan di dalam Klampid New Generation (KNG) tersebut. Perubahan demi perubahan harus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik melalui Klampid New Generation (KNG). Oleh karena itu, konsistensi dari komponen-komponen tertentu, khususnya kerja sama pegawai sangat diperlukan untuk mendukung implementasi dari aplikasi Klampid New Generation (KNG). KNG dapat diakses melalui aplikasi atau web <https://v2.klampid.disdukcapilsurabaya.id/app>

Struktur birokrasi yang baik dan teratur, akan memberikan implikasi yang baik bagi keberjalanan kegiatan pelayanan. Melalui struktur birokrasi yang teratur, diharapkan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik, sehingga peningkatan layanan administrasi publik terkait kependudukan dan pencatatan sipil dapat berlangsung dengan baik. Struktur birokrasi merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja pegawai yang bersangkutan, jika internal perusahaan memiliki sistem kerja yang teratur dan tidak saling tumpang tindih, tentu pelayanan yang didapatkan oleh pemohon akan tepat sasaran, dan memberikan kepuasan tersendiri bagi pemohon yang bersangkutan.

Tampilan aplikasi Klampid New Generation (KNG) memiliki desain yang simpel dan mudah untuk dioperasikan. Tampilan aplikasi Klampid New Generation (KNG) sangat fleksibel bagi semua kalangan usia, baik bagi remaja maupun orang dewasa. Adapun prosedur pelayanan administrasi kependudukan pada layanan pindah keluar pada aplikasi Klampid New Generation (KNG) adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Tampilan awal Klampid New Generation (KNG)

Pada Gambar 2 terlihat bahwa layanan Klampid New Generation (KNG) pada pelayanan pendaftaran penduduk terdiri dari 16 pelayanan, yakni pelayanan batal pindah antar kab/kota/provinsi, batal pindah dalam kota, cetak ulang KK, cetak ulang SKPWNI, dispensasi pindah keluar, dispensasi surat pindah dari daerah asal, Kartu Identitas Anak, pecah KK, penuktahiran gelar, pengajuan KTP Elektronik, perubahan alamat, perubahan biodata, pindah dalam kota, pindah datang, pindah keluar, dan SKTT/KK OA/pindah keluar OA/Exit Permit Only (EPO). Untuk mengakses layanan pindah keluar, maka pemohon dipersilahkan untuk menekan opsi pindah keluar pada tampilan awal aplikasi. Kemudian pemohon akan diarahkan ke menu berikutnya, pemohon dipersilahkan untuk mengisi data-data yang diminta di dalam aplikasi Klampid New Generation (KNG) hingga tahap akhir. Setelah selesai, maka pemohon akan diberikan barcode, yang mana barcode tersebut harus diberikan kepada petugas yang berjaga di kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Bulak Banteng. Apabila pengecekan keaslian permohonan melalui barcode telah selesai dilaksanakan oleh petugas, maka permohonan pindah akan segera diproses oleh pihak yang bertanggungjawab. Selama pemrosesan berlangsung, pihak pemohon dapat memantau perkembangan pemrosesan surat pindah melalui aplikasi Klampid New Generation (KNG) tersebut. Menurut (Putri dan Basyar, 2023), terdapat tiga tahapan pengajuan permohonan pindah keluar, yakni sebagai berikut :

1. Pengisian data melalui melewati aplikasi
2. Uji validitas dokumen yang diajukan
3. Dokumen diterbitkan

Meninjau dari tahapan pemrosesan permohonan tersebut, implementasi Klampid New Generation (KNG) sudah memberikan peningkatan pelayanan administrasi terkait kependudukan dan pencatatan sipil (Bella dkk., 2022). Pengisian data yang dilakukan secara mandiri di rumah pemohon masing-masing, memberikan implikasi terhadap efektivitas waktu, sehingga proses permohonan tidak memerlukan pengisian secara offline, yang mana biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama, karena diberlakukannya sistem antrean (Gultom dan Sadewo, 2022). Secara spesifik, implementasi Klampid New Generation (KNG) sudah memenuhi kriteria *good governance* yang meliputi :

1. Partisipatif

Pada hakikatnya, Indonesia identik sebagai negara demokrasi, yang mana partisipasi rakyat berkontribusi besar terhadap pembangunan bangsa. Partisipatif disini dimaknai bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesadaran diri untuk dapat terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan antusiasnya masyarakat Kelurahan Bulak Banteng dalam menggunakan aplikasi Klampid New Generation (KNG) membuktikan bahwa masyarakat Indonesia secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Akuntabilitas

Setiap data dan informasi yang terlibat di dalam proses pengajuan surat pindah keluar atau layanan sejenisnya, dapat dipertanggungjawabkan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga, tidak terjadi penyalahgunaan data dan informasi pribadi milik pemohon. Keberjalanan pemrosesan permohonan pindah keluar dilaksanakan dengan aman dan nyaman.

3. Efektif

Implementasi Klampid New Generation (KNG) dinilai efektif, utamanya dari segi waktu. Proses pendaftaran dan pengisian data bisa dilakukan pemohon di rumahnya masing-masing secara online, dengan demikian pemohon tidak perlu repot-repot datang secara offline. Pemohon hanya perlu datang ketika tahap verifikasi dan validasi data saja, yang mana tahapan ini tidak memerlukan banyak waktu, cukup petugas memverifikasi kebenaran permohonan, kemudian pemohon dipersilahkan untuk pulang kembali dan memantau proses permohonan melalui aplikasi Klampid New Generation (KNG) tersebut. Apabila dokumen sudah diterbitkan, maka aplikasi Klampid New Generation (KNG) akan menampilkan notifikasi bahwa dokumen bisa diambil di kantor terkait.

4. Proses yang terbuka

Seperti yang sudah diketahui bahwasanya setelah tahapan verifikasi dan validasi data oleh petugas, dalam aplikasi Klampid New Generation (KNG) akan ditampilkan tahapan proses penerbitan dokumen surat pindah keluar. Pada faktanya, hal ini menandakan bahwa proses penerbitan dokumen surat pindah dilakukan secara terbuka, yakni pihak pemohon mengetahui sampai mana status dokumen mereka, apakah sudah dapat diambil atau belum.

5. Tepat sasaran

Penggunaan aplikasi Klampid New Generation (KNG) dinilai tepat sasaran dan memudahkan pelayanan administrasi publik. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme dari warga Kelurahan Bulak Banteng. Banyak warga yang merasa puas dengan kehadiran Klampid New Generation (KNG) tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya dokumen pindah keluar dapat diambil apabila proses permohonan dari pemohon terkait sudah selesai dibuat. Dokumen pindah keluar berbentuk surat yang didalamnya berisi informasi seperti data daerah asal pihak yang pindah, dan juga data kepindahan. Adapun contoh surat keterangan pindah keluar adalah seperti pada Gambar 3. di bawah ini.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 JALAN TIMUR 1, E. KODE POS : 60275
 TELEPON : 0312010910 FAX : 0312010904 EMAIL : dlh_sas@surabaya.go.id

PROVINSI : JAWA TIMUR (26)
 KABUPATEN/KOTA : KOTA SURABAYA (78)
 KECAMATAN : KENGERAN (17)
 DESA/KEKURAHAN : BULAK BANTENG (1003)

SURAT KETERANGAN PINDAH
 ANTAR PROVINSI
SKPWNI/3576/22062023/0167

DATA DAERAH ASAL

1. Nomor Kartu Keluarga : 3078170001000302
 2. Nama Kepala Keluarga : MULJOKUN
 3. Alamat : DESA BANTENG LOR BINNEKA SR RT. 008 RW. 008
 Dusun/Dukuh/Kampung :
 a. Desa/Keurahan : BULAK BANTENG (1003) c. Kota/Kota : KOTA SURABAYA (78)
 b. Kecamatan : KENGERAN (17) d. Provinsi : JAWA TIMUR (26)
 Kode Pos : 60275
 4. NIK Pemohon : 307817000700003
 5. Nama Lengkap : MULJOKUN

DATA KEPINDAHAN

1. Alamat Pindah : LAMULAN
 2. Alamat Tujuan Pindah : KENGERAN RT. 001 RW. 001
 Dusun/Dukuh/Kampung :
 a. Desa/Keurahan : PEKUNJEN (2009) c. Kota/Kota : BANYUWANGI (2)
 b. Kecamatan : BANYUWANGI (11) d. Provinsi : JAWA TIMUR (26)
 Kode Pos :
 3. Kualitas Pindah : ANTAR PROVINSI
 4. Jenis Kependudukan : KEP. KEL. DAN BELLURUH ANDUG. KELUARANGA
 5. Status KK Dag. Yang Tidak Pindah : -
 6. Status KK Dag. Yang Pindah : Nomor KK Tetap
 7. Keluarga Yang Pindah :

NO	NIK	NAMA	TGL. LAHIR	SIK
1.	307817000700003	MULJOKUN	05-05-1977	KEPALA KELUARGA
2.	307817000700004	SARAH PRADANINGSIH	12-04-1978	IBU
3.	307817000700002	REZEY DWI AMALIA	15-05-2013	ANAK

KOTA SURABAYA, 22 JUNI 2023
 Ditandatangani oleh:
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA


 MULJOKUN
 NIK: 307817000700003


 Ajah Inan Soehaji, ST, M.Mt
 NIP. 19730120199021001

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF), BNSN

Gambar 3. Surat keterangan pindah

KESIMPULAN

Implementasi Klampid New Generation (KNG) dikatakan berhasil diterapkan di Kelurahan Bulak Banteng. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan aplikasi Klampid New Generation (KNG) pada administrasi kependudukan, diantaranya adalah faktor *branding*, faktor sumber daya, konsistensi, dan struktur birokrasi dari kelurahan itu sendiri. Secara garis besar terdapat tiga tahapan pengajuan permohonan pindah keluar, yakni sebagai pengisian data melalui aplikasi Klampid New Generation (KNG), verifikasi barcode oleh petugas, kemudian berkas diterbitkan. Apabila meninjau dari tahapan pemrosesan permohonan tersebut, implementasi Klampid New Generation (KNG) sudah memberikan peningkatan pelayanan administrasi terkait kependudukan dan pencatatan sipil. Implementasi Klampid New Generation (KNG) sudah memenuhi kriteria *good governance* yang meliputi partisipatif, akuntabilitas, efektif, proses yang terbuka, dan tepat sasaran.

REFERENSI

- Bella, V. S., Rahmadanik, D., & Hariyoko, Y. (2022). Optimalisasi Aplikasi Klampid New Generation (KNG) guna Tingkatkan Kawasan Sadar Administrasi Kependudukan Kecamatan Tambaksari. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(3), 191-201.
- Gultom, F., & Sadewo, S. (2022). Adopsi Inovasi Klampid New Generation pada Masyarakat Karah. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1).
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi. *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1).
- Hidayati, S. N., & Hariyoko, Y. (2023). Implementasi Klampid New Generation (KNG) terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Rangka Menciptakan Tertib Administrasi di Kelurahan Gading Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(02).
- Kurnianingtyas, L. Y., & Nugroho, M. A. (2012). Implementasi strategi Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Akuntansi pada Siswa Kelas X Akuntansi 3 SMK Negeri 7 Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 10(1).
- Lestari, P. A., Tasyah, A., Syofira, A., Ramayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. United States of America : SAGE Publications.
- Putri, A. D., & Basyar, M. R. (2023). Implementasi klampid New Generation dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya. *Ulil Albab*, 2(2).
- Putri, J. P. A. P., Murti, I., & Rahmadanik, D. (2022). Implementasi E-Klampid di Kelurahan Ngagel Rejo Kota Surabaya untuk Meningkatkan Kemudahan Pelayanan Administrasi Kependudukan. *Seminar Peningkatan Sitasi Internasional*, 1(01).

- Riani, N. K. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11).
- Rochimin, P. (2023). Implementasi Klampid New Generation dalam Mendukung Tertib Administrasi Kependudukan untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 25(2).
- Wahyono, S., Prihatminingtyas, B., Purwatiningsih, A. (2019). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Malang. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1).